

Forum Freedom 28, 28 Nopember 2005

Tema: Check and Balances

Nara sumber : Rizal Mallarangeng

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib (HB):

Halo, selamat pagi, Anda bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Kerjasama Freedom Institute dan Radio 68 H, dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya kali ini adalah Rizal Mallarangeng, direktur eksekutif Freedom Institute. Dan kita akan membahas tentang tema check and balances. Nah, saya mulai dengan pertanyaan awal dulu. Apa yang yang dimaksud dengan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) itu ?

Rizal Malarangeng (RM):

Tema ini memang sangat menarik dan klasik dalam studi politik, kita bisa membahasnya secara kontemporer dalam bentuk kelembagaan-kelembagaan politik, dimana lembaga yang satu mengimbangi lembaga yang lainnya, supaya tidak terjadi dominasi dalam satu kekuatan (dalam satu tangan). Jadi dalam politik ketika kita memakai teori *Triaspolitika* -nya Montesquieu yaitu: Esekutif (pemerintahan), Legislatif (parlemen atau DPR), dan Yudikatif (pengadilan), Pertama ada yang mengambil keputusan (kebijakan) yaitu: Parlemen yang berdasarkan suara rakyat kalau itu berdasarkan sistem Demokrasi, Kedua Eksekutif melaksanakan keputusan itu dan ketiga Yudikatif melihat apakah pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan asas-asas hukum yang ada.

Hal ini cara melihatnya secara formal, jadi tidak ada satu lembaga politik yang dibiarkan untuk dominan, yang lain bisa dikontrol, diawasi oleh yang lain. Misalnya Eksekutif dapat membatalkan keputusan Legislatif, misalnya dengan Hak Veto. Agar tidak terjadi adanya Tirani Mayoritas, Parlemen tidak bisa segalanya melakukan apapun yang mereka kehendaki, walaupun Parlemen itu telah mendapat mandat langsung dari rakyat. Di Amerika Serikat hal ini bisa diveto, tetapi dalam sebuah tataran sistem dimana tidak ada hak veto oleh Eksekutif, ada lagi yang kita sebut Yudikatif, disana (Amerika Serikat) ketiga-tiganya (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) saling mengontrol satu sama lainnya, kehakiman yang puncaknya berada pada sembilan hakim agung, bisa membatalkan keputusan kongres atau parlemen, maupun keputusan Presiden manakala hakim agung ini menganggap bahwa masing-masing lembaga ini melaksanakan atau melakukan keputusan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung sendiri dipilih dan diusulkan oleh Presiden yang kemudian disahkan oleh Parlemen, dari didni maka kita bisa melihat adanya sistem kontrol segi tiga yang saling terkait satu sama lain, dan tidak ada satupun lembaga yang bisa menjadi sangat dominan terhadap yang lainnya. Ini kita bisa kembali lagi nantinya kepada bagaimana cara melihat formalnya, tetapi pada awalnya saya kira ini bermula dari Filosofi tantang manusia, ini sangat menarik karena sistem besar seperti ini tidak bisa tanpa filsafat, tentang bagaiman manusia dengan filsafat politiknya.

HB:

Kemudian kenapa manusia merasa perlu menciptakan sistem yang berimbang (*ceks and balances*) ini?

RM:

Pada intinya pandangan keagamaan juga sama, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia selalu memiliki kekurangan jika mereka diberikan kekuasaan yang dalam hal ini tidak ada pembatasannya, maka mereka cenderung menjadi penguasa yang absolut dan penguasa yang absolut bisa dipastikan korupsi juga secara absolut, hal ini jika dipandang dengan cara pandangan utopian. Seorang politisi dan juga intelektual pada zaman awal Amerika Serikat yang bernama James Madison, mengatakan bahwa *If man were angles goverment become annesessery*: jika manusia itu seperti dewa maka pemerintah tidak perlu. Intinya bahwa manusia bukan dewa ataupun malaikat, manusia punya kecenderungan-kecenderungan positif dan juga mempunyai kecenderungan-kecenderungan negatif, karena dengan adanya manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan positif tersebut maka demokrasi itu mungkin, tetapi karena manusia juga mempunyai kecenderungan-kecenderungan negatif maka demokrasi itu sangat perlu.

Karena penguasa itu adalah manusia yang bukan merupakan patung ataupun sebuah lembaga Impersonal yang dijamin oleh lembaga, karena manusia itu penuh kekurangan yang sangat bisa menerima godaan-godaan dari manapun juga, maka kemudian diperlukannlah lembaga-lembaga pengimbang. Jika manusia memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa atau duduk dalam kekuasaan, walaupun penguasa itu sudah cukup dianggap luhur yang dipilih oleh berjuta-juta manusia dengan cara yang demokratis tetapi hal ini tidak menjadi jaminan. Sebab hal itu adalah hanya sebuah proses dipilihnya dia menjadi seorang presiden, menjadi wakil rakyat, ataupun menjadi hakim agung. Tetapi ketika dia sudah dipilih itu soal lain.

Kita tidak bisa percaya kepada orang-orang yang berkata seperti ini "saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pilihlah saya, karena saya pasti akan mengemban amanah anda, setelah berkuasa saya pasti akan melaksanakan kehendak rakyat bukan memperjuangkan kepentingan saya sendiri atau golongan, tetapi jika saya terpilih.." jangan pernah percaya dengan ucapan seperti itu, kita bisa berkata ya ataupun kita bisa percaya kalau mereka menjamin bahwa dalam melaksanakan tugasnya itu harus ada mekanisme sistem kontrol yang berjalan dengan baik. Sistem kontrol tersebut walaupun tidak bisa setiap saat bisa mengontrolnya tapi harus melekat dalam tata kelembagaan, dari sini kita bisa kembali kepada teori Trias Politika-nya Montesquieu. Sistem modern yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dengan berbagai macam varian-varianya yang cenderung ke arah proses perimbangan kekuasaan (*ceks and balances*) itu. Dan pada saat ini di Indonesia pun sedang belajar ke arah sana dengan langkah awalnya mempersiapkan perangkat lembaganya, walaupun perilakunya belum mengindikasikan ke arah sana.

HB:

Kalau seperti yang anda paparkan tadi, apakah perimbangan kekuasaan (*ceks and balances*) itu terkait erat dengan demokrasi secara umum?

RM :

Ya, terkait tetapi hubungannya tidak mutlak, karena jika kita kembali kepada makna dasar dari demokrasi yaitu: *Demos* dan *Kratos* yang berarti kekuasaan rakyat. Maka dengan pengertian tersebut bisa memungkinkan bahwa rakyat bisa berkuasa secara tiranikal, misalnya jika ada kelompok mayoritas yang menang dalam pemilu sekitar 50% lebih, sementara dilain pihak tidak ada lembaga pengimbang pada puncak-puncak kepemimpinan, maka kekuasaan itu kemudian bisa berubah menjadi bersifat tirani yang kemudian bisa disebut Tirani Mayoritas. Pada saat Aldolf Hitler menjadi kanselir Jerman yang terpilih secara demokratis oleh mayoritas, tetapi pada saat yang bersamaan tidak ada lembaga-lembaga pengimbangannya yang bisa mengontrol, maka apa yang terjadi kemudian adalah Aldolf Hitler membubarkan parlemen dan para hakim agungnya dibawah kontrolnya secara langsung, maka jadilah kekuasaan yang bersifat tiranikal. Maka demokrasi itu bagus, tetapi prasyarat kelembagaan yang menyertainya harus mengandung asas-asas dan paraktek perimbangan kekuasaan (*ceks and balances*).

HB:

Jadi tidak sepenuhnya mutlak tetapi terkait ya..

RM :

Ya, tidak mutlak secara konseptual tetapi dalam prakteknya demokrasi tidak akan langgeng jika tidak adanya saling mengawasi antar lembaga-lembaga tinggi negara. Misalnya sekarang ini bapak presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bapak wakil presiden Jusuf Kalla yang terpilih secara mayoritas yaitu sekitar 62%, kalau hanya mereka saja dalam menjalankan tugas pemerintahan tanpa adanya peran dari lembaga Legislatif (DPR) dan lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung), keduanya (walaupun sama-sama orang yang berkepribadian baik) akan cenderung menjadi tiranikal karena dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan kalau tidak ada yang mereka takutkan yang akan mengontrolnya, maka secara naluriah dan alamiah mereka seiring dengan proses perjalanan waktu yang mendesak akan mengambil keputusan yang dalam pertimbangan mereka selalu menguntungkan bagi keduanya.

HB:

Belum tentu mereka pada awalnya merencanakannya, mungkin saja apakah karena adanya desakan situasi ?

RM :

Bisa saja orang-orang baik, ketika mengambil keputusan akan berakibat merugikan orang banyak, dan sebaliknya orang-orang yang berkepribadian jahat tetapi ketika mengambil keputusan akan berakibat menguntungkan orang banyak. Politik kan bukan pada tataran personal melainkan berbicara pada masalah kelembagaan, tidak ada jaminan bahwa orang baik pasti memiliki kebijakan yang baik pula begitupun sebaliknya, ini kan kita berbicara masalah lembaga-lembaga pengatur. Begitu banyak interaksi manusia dalam politik, semuanya ingin mencari keuntungan, ingin mementingkan diri sendiri ataupun kelompok.

Karena disinilah kita bisa melihat apa gunanya politik, dalam politik harus ada sesuatu yang diprjuangkan dan dibela, dan ini menurut saya sah-sah saja karena kalau tidak begitu maka tidak demokrasi. Kalau manusia tidak mempunyai dimensi seperti itu maka demokrasi tidak perlu, justru karena manusia-manusia itu kecenderungannya hanya mementingkan dirinya sendiri, ingin memperjuangkan apa yang mereka anggap benar bukan

apa yang orang lain menganggap itu benar, maka demokrasi itu harus. Supaya ada mekanisme bersama dimana ada putusan atau argumen yang dianggap benar yang harus di laksanakan bersama, tetapi harus ada kelembagaan dimana adanya mekanisme kontrol yang jelas diantara satu sama lainnya. Memang disini ada perbedaan sistem politik seperti sistem politik presidensial misalnya di Amerika Serikat dan Indonesia, sistem politik parlementer misalnya di Inggris, Jerman ataupun sistem politik kombinasi keduanya misalnya di Prancis. Dalam sistem politik parlemen, parlemen lebih berkuasa mutlak di banding dengan sistem politik presidensial, karena selain anggota kabinat dan perdana menteri mereka juga menjadi anggota koalisi yang berkuasa di parlemen, tetapi disana juga ada Mahkamah kehakiman yang berfungsi dengan baik dalam mengontrol Eksekutif, selain itu diluar dari lembaga-lembaga tersebut juga ada partai-partai oposisi. Kekuasaannya itu ada yang berkuasa melaksanakan, memutuskan dan ada juga yang menjadi hakim, apakah semuanya ini memainkan peranannya masing-masing dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, inilah yang kemudian sering kita sebut dengan perimbangan kekuasaan (*checks and balances*).

HB :

Selama ini kalau kita membahas dari ketiga sayap pemerintahan atau kekuasaan itu, biasanya ada yang dianggap paling tidak mempunyai kepentingan politik sama sekali yaitu lembaga yang kita sebut Yudikatif. Dan sekarang ini orang mulai membicarakan hal ini, misalnya di Amerika Serikat dimana orang-orang sudah mulai membicarakan tentang Tirani Yudikaif.

RM :

Ini menarik sekali karena yudikatif tidak mempunyai kepentingan formaliah, dalam artian bahwa presiden mewakili partai atau mewakili kekuasaan politik dan kemudian memperjuangkan sesuatu untuk menghasilkan kebijakan, demikian pula para anggota kongres atau parlemen yang mewakili partai politik atau mewakili kelompok kepentingan daerah asalnya, kalau memang mereka senator berdasarkan negara bagian. Hakim Agung tidak berpolitik dalam pengertian itu, tetapi mereka juga berpolitik, karena Hakim Agung juga sebagaimana manusia biasa sama seperti yang lainnya yang memiliki ide-ide, memiliki kepentingan dalam pengertian mereka punya konsepsi tentang apa yang disebut sebagai Hukum Positif, bagaimana menginterpretasikan politik, mereka bisa ada diposisi kanan, tengah ataupun di posisi kiri, misalnya di Amerika Serikat ada Hakim Agung yang konserfatif.

HB:

Tadi kita sudah membicarakan tentang adanya kemungkinan Tirani Yudikatif, karena satu pihak yang dianggap paling steril dari kepentingan politik dibanding Eksekutif dan Legislatif yang notabene berasal dari partai-partai politik, sementara para hakim tidak berasal dari partai-partai politik.

RM :

Kalau tadi dikalangan sembilan hakim agung (nine solomons) di Amerika Serikat itu, ada lima hakim agung yang konserfatif dan empat yang liberal (liberal dalam pengertian *Liberal American*), politik mereka adalah politik perjuangan gagasan. Bagaimana konserfatisme itu dipakai sebagai sarana untuk menginterpretasikan hukum, karena hukum itu kan

tidak selalu lengkap. Konstitusi Amerika Serikat misalnya itu kan masih butuh interpretasi dalam melihat kasus-kasus yang kongkrit seperti aborsi, kewajiban untuk sekolah, perlindungan hukum. Dan masih banyak sekali kasus-kasus kongkrit yang masih butuh interpretasi yang lebih lanjut. Institusi itu sendiri tidak boleh lengkap, kalau lengkap maka akan bersifat kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan zaman, jadi pada saat itulah gagasan-gagasan konserfatisme ataupun gagasan-gagasan liberalisme itu menjadi bagian dari politik, karena mereka mempengaruhi keputusan-keputusan hakim agung dan keputusan-keputusan hakim agung itu adalah keputusan akhir yang tidak ada lagi yang bisa mengubahnya baik itu presiden maupun parlemen atau kongres.

Inilah kenapa dianggap misalnya hakim agung itu terlalu banyak karena ini adalah daerah kelabu, ada yang sudah diputuskan oleh kongres ataupun presiden. Sebenarnya ini harus dibiarkan saja sebab ini merupakan bagian dari proses politik, tiba-tiba hakim agung mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan konstitusi maka keputusan itu bisa dianulir, jadi disini yang berkuasa bukan parlemen atau presiden melainkan hakim agung. Pada saat ini lah hakim agung dianggap sudah terlalu jauh berpolitik, tetapi ini adalah daerah kelabu, misalnya kewajiban untuk tidak merokok di ruang tertutup atau aborsi, apakah cukup diputuskan oleh parlemen atau presiden, atukah ini sudah menjadi masalah konstitusi. Hak-hak dasar orang untuk memilih hidupnya, kalau hal ini dianggap merupakan masalah konstitusi maka hakim agung lah yang akan memutuskan karena hakim agung merupakan satu-satunya lembaga yang bisa menginterpretasikan konstitusi dan inilah bentuk kekuasaan hakim agung.

Di Indonesia misalnya masalah yang sama pasti akan terjadi dan ini namanya kan kita sudah mempunyai konstitusi, yang bernama mahkamah konstitusi. Semua hal hampir dalam dimensi kehidupan manusia itu pasti cepat atau lambat sedikit banyak akan terkait dengan konstitusi, misalnay anda miskin terlantar, dikonstitusi disebut bahwa anak-anak terlantar dan yatim piatu di pelihara oleh negara atau masalah pendidikan, di konstitusi disebutkan bahwa pendidikan dianggarkan sebesar 20% dari APBN. jadi apa bila pemerintah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi maka para hakim konstitusi bisa menegurnya, seperti apa yang telah di lakukan oleh ketua hakim konstitusi Jimly assidiqy beberapa waktu yang lalu. Lama kelamaan kita harus terbiasa dengan kondisi ini dan harus menyesuaikan dengan konstitusi, dimana hal ini kita posisikan sebagai alat pengimbang baru. Jadi bukan hanya parlemen dan presiden yang menentukan anggarn negara tetapi hakim konstitusi juga memiliki otoritas untuk itu.

HB:

Hal yang sama bisa dikatakan oleh orang lain, sepanjang itu sesuai dengan konstitusi, misalnya anggota DPR.

RM :

Intinya bahwa anggota DPR bisa melakukan apapun, tetapi hakim konstitusi bisa mengatakan bahwa apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi, jika tidak sesuai maka harus dianulir kebijakan tersebut, disini bisa mempunyai implikasi politik yang sangat besar yang kemudian pada saat ini orang menyebutnya sebagai *Yudisitial Activisme* . Dimana para hakim bukanya para anggota DPR maupun birokrat atau politisi yang memutuskan kebijakan sosial, politik dan ekonomi.

HB:

Jadi *Judicial Activisme* itu apakah pengertiannya agak peyoratif ?

RM :

Tergantung pada anda suka atau tidak suka dengan keputusan tersebut.

HB:

Artinya ada indikasi setengah tuduhan bahwa hakim itu berpolitik?

RM :

Ya, kalau dibilang hakim berpolitik itu bisa disebut peyoratif, jadi ini artinya sudah mencampuri urusan DPR dan eksekutif, hal ini bisa dikatakan seperti itu. Tetapi bagi mereka yang suka dengan keputusan tersebut, misalnya dalam soal keputusan aborsi di Amerika, mereka yang suka dengan putusan ini yang bisa disebut kaum segregasi menganggap bahwa putusan itu sudah benar, tetapi bagi kaum kiri yang biasa disebut dengan kaum desegregasi menganggap bahwa yang memutuskan perkara ini bukan pemerintah. yang mengambil putusan di Amerika pencampuran penduduk kulit putih dan kulit hitam itu bukan oleh presiden ataupun kongres, putusan ini ditentukan oleh mahkamah agung. Bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut akan selalu mempertanyakan kenapa yang memutuskan hakim agung, bukan parlemen atau presiden, tetapi sebaliknya orang yang mendukung putusan tersebut menganggap bahwa putusan tersebut sudah benar karena hakim memiliki otoritas disini.

HB:

Tetapi hal ini harus berdasarkan dengan asumsi dasar tentang sterilitas politik dari para hakim, artinya apakah ada yang bisa diberatkan atau ditolak dalam hal ini ?

RM :

Asumsi sterilitas atau netralitas itu kan pada tataran formal, tetapi dalam tataran praktik itu kan sangat naif sekali, karena netral itu dalam pengertian apa? netral dalam pengertian tidak mewakili parlemen, eksekutif atau partai, ini mungkin bisa dikatakan ya. Tetapi netral dalam pengertian bahwa mereka tidak mempunyai ide atau kepentingan itu tidak mungkin, karena seseorang ketika berada pada lembaga yang sangat penting itu pasti mempunyai ide atau kepentingan. Kita kembali lagi pada James Madison, bahwa tidak mungkin ada orang yang berada di suatu tempat yang didalamnya penuh dengan daya tarik menarik kepentingan manusiawi, tidak mempunyai ide atau kepentingan sama sekali. Manusia itu bukan dewa atau malaikat bahwa manusia itu adalah makhluk biasa, begitu pula hakim agung pun juga manusia. Disini yang penting adanya proses atau prosedur yang tidak boleh dilanggar. Ketika hakim agung Amerika Serikat memutuskan bahwa yang menang dalam pemilu 2000 adalah Josh W. Bush bukan Al Gore, maka masyarakat Amerika menerimanya walaupun Al Gore sendiri keberatan dengan putusan ini.

HB :

Inilah yang menarik sekali, bahwa mengapa rakyat Amerika itu sangat hormat pada lembaga hakim agung (*Nine solomons*) ini ?

RM :

Pertama memang tradisi hakim agung di Amerika itu sangat kuat, yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara lain termasuk juga dengan negara Indonesia. Tradisi hukumnya sangat kuat sekali, sekolah-sekolah

terbaik di Amerika itu adalah sekolah-sekolah hukum, hampir semua anggota hakim agung itu adalah para ahli hukum selain itu mereka juga filosof, penghargaan terhadap hukum dan propesi hukum itu sangat tinggi. Dan pada praktiknya sejarah hakim agung, bagaimana keputusan mereka, bagaimana orang-orang, memang sangat diakui integritasnya walaupun mereka tidak setuju, seperti yang terjadi pada anggota hakim agung Amerika Antholin Skalya yang sangat kanan tetapi orang-orang kiri sangat respek meski bertentangan dengannya, karena dia dianggap sebagai orang sekuler dalam hukum piawai. Di Indonesia penghormatan terhadap hukum dan profesi hukum masih sangat rendah, tindakan tokoh-tokoh yang berada dalam profesi ini kadang-kadang masih belum bisa menjadi sumber atau teladan. jadi memang tradisi hukum kita belum cukup kuat dan ini yang harus menjadi sumber keprihatinan kita dan harus kita rubah, kita harus jadikan profesi hukum, studi hukum dan para praktisi hukum sebagai teladan-teladan dalam masyarakat kita untuk sampai kesana.

HB :

Sekarang misalnya ada ketidak puasan terhadap keputusan hukum terutama kepada Mahkamah Agung, kalau terjadi seperti itu apakah mungkin keputusan Mahkamah Agung itu dipersoalkan lagi, misalnya di kongres, atau semua harus tunduk dengan keputusan Mahkamah Agung?

RM :

Keputusan Mahkamah Agung itu merupakan keputusan akhir dan sudah final tidak bisa di bantah atau dianulir oleh parlemen ataupun presiden. Para hakim agung berkuasa sampai kapanpun, seumur hidupnya sejak mereka terpilih.

HB :

Ini yang membuat saya heran, kenapa di Amerika serikat memakai sistem Mahkamah Agung seumur hidup ?

RM :

Itulah tipikal Platoniktik Filosofi, Amerika serikat membuktikan dengan sistem Mahkamah Agung yang seumur hidup dan tidak bisa diganti dan tidak bisa dibatalakan, membuktikan bahwa demokrasi Amerika serikat mengetahui batas-batasnya sendiri, harus ada yang menjadi hakim diatas perbedaan-perbedaan partai politik yang formal. Kalau tidak ada hakim agung maka Amerika serikat mungkin sudah terpecah pada tahun 2000 antara Josh W. Bush dengan Algore, karena keduanya pada pemilu 2000 sama-sama mendapatkan suara 50%. Maka tidak ada yang bisa memutuskan siapa yang menang, harus ada orang yang berada diluar merek auntuk memutuskan dan kemudian diterima oleh kedua pelah pihak serta masyarakatnya, inilah kekuatan demokrasi yang maju. Karea itulah saya kira demokrasi Amerika yang sudah bertahan sekitar 200 tahun ini akan terus berjalan. Tidak ada sistem demokrasi dinegara-negara manapun yang bisa membandinginya. Inggris bisa stabil, kantine dan terus berlangsung setelah berubah dari sistem Aristokarsi monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Amerika serikat bertahan demokrasinya sejak awal sampai saat ini yang seperti itu, salah satunya mereka menyadari akan kelemahan dirinya. Ini tidak demokratis tetapi ada dan sah yang baik bagi demokrasi jadi ini elemen dari *filosofeking*-nya Plato, artinya perubahan-perubahan terjadi pada pinggir saja tidak terjadi pada bentuk dasarnya, elemennya 200 tahun jalan terus semakin bagus dan semakin kuat.

HB :

Dengan setatus yang sangat istimewa dari para hakim agung tersebut ?

RM :

Sejak awal sekali setelah dipilih, tidak bisa diganti (kecuali dia melakukan tindakan kriminal seperti membunuh orang) karen asemua orang ada batasnya, tetapi dari segi kedudukanya dan profesinya kalau tidak ada kasus-kasus yang luar biasa itu tidak bisa dibantah,di kontrol,tidak bisa diganti dan tidak bisa dilawan.

HB :

Kalau di Indonesia prospeknya itu bagaimana? Dan anda tadi sudah membicarakan soal pemerintahan, hukum dan lainnya, sekarang refleksi anda sendiri bagaimana?

RM :

Ya, kita tentu saja sedang berada dalam proses menuju kesana, dalam proses kembali pada ide dasar tadi yaitu perimbangan kekuasaan (*check and balances*), dimana presiden dikontrol oleh parlemen, parlemen juga dikontrol oleh presiden dan kedua-duanya dikontrol oleh mahkamah agung serta mahkamah konstitusi, juga sebaliknya mahkamah agung dan mahkamah konstitusi tidak bebas begitu saja, ini terbukti bahwa ketua mahkamah agung bisa diperiksa oleh KPK karena adanya tuduhan korupsi terkait dengan kasusnya Probosutedjo. Jadi dia bisa mengontrol dan juga bisa di kontrol,hal ini bagus dalam pengertian bahwa perangkat kelembagaanya betapapun tidak sempurna,sekarang ini sudah mulai terbangun dengan lebih baik. Setelah lembaganya sudah ada, sekarang tinggal mengisi jiwanya, dengan jiwanya itu kita berharap bahwa perilaku masing- masing tokoh yang duduk dalamsistem ini juga semakin baik. Sejalan dengan didirikannya lembaga-lembaga itu,lebih jauh lagi sejalan dengan cita-cita kita bersama untuk membuat masyarakat Indonesia lebih demokratis dan lebih sejahtera.